

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NUR AKMA WILDA
NIM. 210802136**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024/2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang ertandatangani di bawah ini:

Nama : Nur Akma Wilda
Nim : 210802136
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosisl dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Tamiang Hulu, 07-06-2003
Alamat : Aceh Tamiang, Desa Perupuk

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan memepertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan




Nur Akma Wilda

NIM. 210802136

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM MENANGGULANGI RISIKO BANJIR DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NUR AKMA WILDA

NIM. 210802136

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

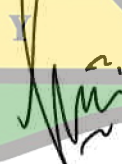
Pembimbing I,


13
08 025

Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007

Pembimbing II


14/8/2025

Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si

NIP. 197802032005041001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH**

TAMIANG

SKRIPSI

NUR AKMA WILDA

NIM. 210802136

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Pemerintah UIN-Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus Serta Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Saif Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

Sekretaris

Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si

NIP. 197802032005041001

Penguji I

Siti Nur Zalikha, M.Si

NIP. 199002282018032001

Penguji II

Zakki Fuad Khalil, M.Si

NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penanggulangan risiko banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi perhatian penting mengingat frekuensi banjir yang cukup tinggi serta dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penelitian ini mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang dalam menghadapi risiko banjir, dengan fokus pada kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, ditemukan bahwa BPBD telah menyusun rencana kontingensi yang komprehensif, melakukan sosialisasi mitigasi bencana secara berkelanjutan, serta mengembangkan sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Namun, efektivitas penanganan banjir masih terbatas oleh kendala seperti keterbatasan infrastruktur fisik, terutama tanggul dan sistem drainase, serta keterbatasan pendanaan yang mengakibatkan penanganan pascabanjir lebih bersifat reaktif dan bergantung pada bantuan luar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas BPBD dan peningkatan alokasi anggaran khusus, optimalisasi infrastruktur pengendalian banjir, serta pengembangan metode sosialisasi yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan risiko banjir dapat diminimalisasi secara berkelanjutan dan keselamatan masyarakat Aceh Tamiang dapat lebih terjamin.

Kata Kunci: *Penanggulangan bencana, BPBD, Risiko Banjir, Mitigasi Banjir*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI RISIKO BANJIR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG” Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Berikut ini ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.PA., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.A.P. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P. Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Dr. Said Amirulkamar. MM. M.Si. dan Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si Pembimbing yang telah memberikan masukan luar biasa dan tempat diskusi akan semua persoalan yang di dapati dalam menulis skripsi ini.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
8. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada cinta pertama dan pintu surga penulis yakni Abah 'Sahmuiddin S.Pd.' dan Mama 'Dewi Masitah.'. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tiada henti, dan pengorbanan besar yang kalian berikan selama perjalanan panjang ini. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi penulis dalam menuntaskan skripsi ini. Setiap tetes keringat dan lelah yang penulis rasakan, selalu terbayar dengan dukungan dan kasih sayang Mereka. Semoga hasil ini bisa menjadi kebanggaan dan doa terbaik bagi kita semua. Terima kasih Abah dan Mama, atas segalanya.
9. Terima kasih kepada kakak tercinta penulis yakni Syafira Fitria S.Pd dan Zeinida Maulidina S.Pd, atas dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kakak selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini selesai dengan baik.

10. Tak lupa juga penulis ucapkan untuk abang ipar ‘Fuad M Rizky Rambe S.Pd. M.Pd yang telah menjadi sosok abang buat penulis, yang telah memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk adik-adik tercintaku, Inthan Syahraini, Syifa Zahira dan Muhammad Al-Fathan, yang selalu hadir dengan cinta, tawa, dan semangat yang menghangatkan hari-hari penulis. Kalian adalah sumber kekuatan penulis sehingga tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Semoga kita selalu saling mendukung dan menguatkan dalam setiap perjalanan hidup.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses meraih gelar sarjana.
13. Terakhir terima kasih untuk wanita manja namun memiliki impian yang begitu besar yaitu diriku sendiri ‘ Nur Akma Wilda’ yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah tidak mudah menyerah meski banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Aku bangga atas segala usaha, pengorbanan, dan waktu yang telah kuhabiskan demi mencapai tahap ini. Semoga rasa percaya diri dan kerja keras ini menjadi modal berharga untuk langkah selanjutnya dalam hidupku. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan

semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam
lindungan-Nya. Aamiin.

Penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun supaya
menjadi pembelajaran kepada penulis secara khusus. Pada akhirnya penulis
berharap semoga hasil penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Nur Akma Wilda



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Penjelasan Istilah.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Teori Peran.....	16
2.2.2 Penanggulangan bencana.....	21
2.2.3 Teori Kebencanaan.....	25
2.2.4 Teori Koordinasi.....	30
2.3 Kerangka Berfikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2. Fokus Penelitian	33
3.4. Sumber dan Bentuk Data.....	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Informan Penelitian	36
3.7. Teknik Keabsan Data.....	37
3.8. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1 Profil Kabupaten Aceh Tamiang.....	40
4.1.1 Keadaan Geografis.....	42
4.1.2 Keadaan Penduduk	43
4.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang	44
4.2.1 Visi dan Misi BPBD Aceh Tamiang.....	44
4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Aceh Tamiang	44
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	45
4.4 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang	45

4.5 Kendala Yang di Hadapi BPBD Dalam Penanggulangan Banjir	69
4.5.1 Pendanaan	85
Tahun.....	96
4.6 Pembahasan Penelitian	99
4.6.1 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang.....	100
4.6.2 Kendala Yang Dihadapi BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang	104
BAB V PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan suatu kejadian alamiah ketika air meluap dan membanjiri kawasan yang pada kondisi normalnya tidak basah atau terendam. Umumnya, tingginya intensitas curah hujan menjadi faktor utama terjadinya peristiwa ini, khususnya pada saat musim hujan berlangsung sehingga banyak daerah di Indonesia kerap mengalami bencana banjir. Walaupun banjir merupakan peristiwa alam yang kerap terjadi di banyak wilayah, dampaknya akan terasa sangat besar ketika mempengaruhi manusia, khususnya dalam kasus berkepanjangan yang mampu mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu seluruh masyarakat harus selalu waspada terhadap bencana ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alinea ke-IV, ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Pelaksanaan amanat tersebut merupakan kewajiban yang harus dipikul secara kolektif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh elemen bangsa. Perubahan dalam kebijakan, kelembagaan, sistem koordinasi, dan prosedur operasional membuka peluang bagi keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pembangunan nasional. Dalam konteks penanggulangan bencana, otoritas utama berada di tangan pemerintah pusat dan daerah, dengan pelaksanaan teknik dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNBP) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat regional.¹

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, upaya penanggulangan bencana diposisikan sebagai elemen penting dalam agenda pembangunan nasional. Proses ini meliputi tindakan dan langkah-langkah yang dilaksanakan secara sistematis baik pra-bencana, pada saat peristiwa berlangsung, maupun ketika fase pasca-bencana. Adapun maksud utama dari penanggulangan bencana sebagaimana tercantum di pasal 4 adalah sebagai berikut: (a) melindungi seluruh masyarakat dari resiko bencana, (b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, (c) menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan terpadu, (d) menghargai budaya lokal, (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (f) mendorong semangat gotong royong, kedermawaan, dan kesetiakawanan, (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan bencana, Pasal 1 ayat 1, kejadian banjir di wilayah Aceh Tamiang memenuhi kriteria sebagai bencana. Fenomena tersebut telah menyebabkan kerugian beragam, meliputi dampak fisik, sosial, dan emosional bagi penduduk. Sumber terjadinya banjir dapat berasal dari proses alam, faktor

¹ Maulana Masthura, (2022) “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,”.

manusia, maupun unsur lain di luar keduanya. Konsekuensi yang dihadapi antara lain jatuhnya korban jiwa, kerusakan pada ekosistem, kehilangan aset dan barang milik penduduk, serta tekanan psikologis yang dialami oleh masyarakat terdampak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, khususnya pasal 35 dan 36, menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memformulasikan rencana penanggulangan bencana sebagai langkah mitigasi. Ketentuan ini dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengharuskan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota menetapkan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan berpedoman pada ketentuan nasional yang berlaku. Untuk efektivitas penanganan bencana ditingkat daerah, diperlakukan kebijakan daerah yang mengacu pada peraturan yang berlaku guna memastikan kesiapsiagaan dan respons yang terkoordinasi.

Berikut adalah data kejadian banjir di Aceh Tamiang dalam periode 2020 hingga 2023 yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Bencana Banjir di Aceh Tamiang Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Frekuensi/Tinggi Banjir	Tanggal/Bulan	Pengungsi
1.	2023	10 s/d 150 cm	21 Januari	3.478 Jiwa
2.	2022	20 s/d 230 cm	6 November	107.981 Jiwa

		70 cm	22 November	47 Jiwa
3.	2021	20 s/d 150 cm	13 Januari	19. 540 Jiwa
3.	2020	20 s/d 100 cm	17 Mei	152 Jiwa

Sumber Data: BPBD Kabupaten Aceh Tamiang

Wilayah Aceh Tamiang di Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, yang dipengaruhi oleh letak geografis serta sejumlah faktor pendukung lainnya. Peristiwa banjir yang berulang di kawasan tersebut telah membawa dampak negatif yang luas, mencakup kerugian materiil dan terganggunya kehidupan sosial warganya. Meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan berbagai strategi penanggulangan bencana dan langkah-langkah mitigasi, masih terdapat persoalan serta ketimpangan yang perlu ditangani lebih lanjut agar penanganan banjir dapat berjalan optimal.³

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Kondisi geografis wilayah ini membuatnya sangat mudah terdampak, khususnya karena keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang yang melintasinya. Setiap musim hujan tiba, DAS Tamiang sering memicu terjadinya banjir secara berulang di kawasan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan curah hujan tinggi, kerusakan tanggul, serta pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Banjir di Aceh Tamiang tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga menyebabkan kerugian besar

³ Munawarah, R., & Maulidian, M. O. R. (2022). *Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Teluk Halban Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 7(1), 85-94.

terhadap infrastruktur, lingkungan, dan perekonomian. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana, khususnya peran BPBD, menjadi sangat krusial untuk meminimalkan risiko dan dampak dari bencana ini.⁴

Salah satu peristiwa banjir besar yang mencatatkan dampak signifikan terjadi pada 21 Desember 2006, saat banjir bandang melanda sebagian besar wilayah Aceh Tamiang akibat curah hujan yang sangat tinggi di DAS Tamiang. Sungai Tamiang meluap hingga menggenangi 85% wilayah permukiman, dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 4 meter. Sebanyak 191 dari 212 desa terendam banjir, menyebabkan banyak rumah hanyut, infrastruktur seperti Puskesmas, Polindes, gudang farmasi, dan sarana transportasi darat rusak, serta komunikasi terganggu. Selain itu, aktivitas ekonomi lumpuh total, sehingga masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir serupa di masa mendatang.⁵

Beberapa waktu kemudian, yakni pada tanggal 27 Desember 2023, sejumlah daerah kembali mengalami banjir, dengan tingkat genangan air yang berkisar antara 30 sentimeter sampai 1 meter. Sebanyak 2.400 warga terpaksa mengungsi di 23 lokasi pengungsian, dengan beberapa kecamatan terdampak termasuk Tamiang Hulu, Karang Baru, Seruway, dan Rantau. Peristiwa ini juga

⁴ Bustari, A., Trisnantoro, L., & Hasanbasri, M. (2018). *Kolaborasi lintas sektoral dalam kesiapsiagaan bencana banjir studi kasus di Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*, 1(1), 42-63.

⁵ Chandra, D., Prilius, N., & Tampubolon, M. I. (2023). *Sosialisasi Dampak Bencana Banjir Dan Dagusibu Vitamin Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, 2(1), 16-21.

memakan korban jiwa, dengan dua anak dilaporkan meninggal di Desa Perkebunan Pulau Tiga. Setelah air mulai surut di beberapa wilayah, sebagian warga yang mengungsi mulai kembali untuk membersihkan lumpur bekas banjir. Namun, kerusakan yang ditinggalkan sangat luas, termasuk terhadap rumah warga, fasilitas umum, dan lingkungan sekitar.⁶

Pada bulan Oktober 2024, wilayah Aceh Tamiang kembali dilanda banjir parah yang dipicu oleh curah hujan ekstrem dan terputusnya tanggul sungai. Situasi ini menyebabkan luapan air sungai merendam kawasan pemukiman, sehingga memaksa banyak warga harus mengungsi secara massal. Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, beserta jajaran Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda, melakukan kunjungan langsung ke daerah yang terdampak, termasuk meninjau bagian tanggul yang mengalami kerusakan. Bantuan secara langsung juga didistribusikan kepada para pengungsi di Pekan Seruway. Di samping itu, pemerintah turut menggelar rapat virtual guna mengkoordinasikan pemantauan serta penanganan banjir di sepuluh kabupaten dan kota lain yang terimbas bencana ini. Meski bantuan segera disalurkan, kenyataan bahwa banjir kembali terjadi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan sistem mitigasi bencana dan pengelolaan sungai yang lebih baik.

Setiap musim hujan, wilayah Aceh Tamiang kerap mengalami banjir, khususnya di daerah-daerah di sepanjang aliran Daerah Aliran Sungai (DAS)

⁶ Yovitra, R., Karim, A., & Rusdi, M. (2024). *Rancangan Model Builder Sistem Informasi Geografis untuk Daerah Kerawanan Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 9(3).

Tamiang yang membentang melalui 10 dari total 12 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Penyebab utama banjir meliputi curah hujan tinggi, luapan sungai, dan kondisi tanggul yang rusak. Dampaknya dirasakan mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir, dengan kerugian besar terhadap infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Curah hujan yang sangat deras dan perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan aliran air sungai melebihi kapasitas normalnya. Ketika volume air yang masuk ke sungai melampaui kapasitas tebing sungai, maka terjadi banjir yang menyebabkan tanggul sungai jebol.⁷ Volume air yang berlimpah dapat menyebabkan luapan air sungai yang melampaui bantaran, sementara kerusakan tanggul atau ketiadaan infrastruktur yang memadai menjadikan limpasan tersebut sebagai bencana yang tak terhindarkan. Tanggul yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama justru jebol akibat tidak terpelihara atau karena ketahanannya yang tidak memadai untuk menahan debit air ekstrem.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir perlu ditingkatkan, seperti kegiatan gotong royong pembersihan saluran air atau penataan permukiman di bantaran sungai, mempercepat terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana masih sering dinomorduakan.

⁷ Nugroho, dkk, "Kajian Faktor Penyebab Banjir Dalam Perspektif Wilayah Sungai: Pembelajaran Dari Sub Sistem Drainase Sungai Beringin". Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol.17, No.2, 2021, hal. 122.

Permasalahan ini semakin rumit dengan terbatasnya anggaran dan infrastruktur yang memadai dari pihak pemerintah daerah. Alokasi dana untuk program penanggulangan bencana banjir dan pembangunan infrastruktur baru seperti tanggul seringkali kalah bersaing dengan kebutuhan sektor lain. Akibatnya, penanganan banjir bersifat reaktif dan temporer, hanya berfokus pada tanggap darurat pencegahan jangka panjang.

Selain itu, kurangnya koordinasi yang solid dan berkelanjutan antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat, serta antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat menciptakan penanganan yang tersekat-sekat dan tidak terintegrasi. Masing-masing pihak sering bekerja sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan, sehingga upaya yang dilakukan menjadi tidak efektif dan efisien. Sinergi yang lemah inilah yang kemudian membuat siklus banjir dari tahun ke tahun terus berulang tanpa adanya resolusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyoroti perlunya analisis komprehensif terhadap kontribusi BPBD Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Fokus utama terletak pada evaluasi strategi penanganan yang telah diterapkan, identifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan, serta penelusuran alternatif tindakan yang berpotensi untuk memperkuat efektivitas intervensi di periode mendatang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis peran BPBD Aceh Tamiang, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung upaya penanggulangan bencana secara lebih terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi

nyata dalam mendukung pembangunan yang tangguh terhadap bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada ranah ini, keterlibatan aktif pemerintah setempat, komunitas warga, serta berbagai pihak yang berkepentingan memiliki urgensi yang tinggi. Kolaborasi yang erat antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, elemen masyarakat, dan seluruh stakeholder perlu ditingkatkan guna membangun mekanisme mitigasi yang mampu berjalan secara efisien serta berkesinambungan. Selain itu, pengelolaan DAS, perbaikan infrastruktur tanggul, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penanggulangan bencana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko banjir di Aceh Tamiang dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan kualitas hidup yang lebih baik.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh bahwa bencana banjir selalu terjadi setiap tahun di Aceh Tamiang, dampak yang muncul akibat banjir tersebut berupa kerugian fisik maupun kerugian non-fisik terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, dan belum optimalnya peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Aceh Tamiang.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang dalam menanggulangi bencana banjir di Aceh Tamiang?

2. Apa kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas yang telah di rangkum, berikut tujuan penelitin disusun sebagai berikut:

1. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengurangi dampak banjir yang terjadi di wilayah tersebut.
2. Fokus kajian berada pada identifikasi kendala yang dihadapi oleh BPBD selama proses penanggulangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah alternatif solusi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas program penanggulangan bencana di masa mendatang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan sosialisasi kepada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang mengenai tantangan dan solusi dalam penanggulangan banjir, sehingga dapat meningkatkan efektivitas respons dan mitigasi bencana.
- b) Memberikan data yang relevan kepada warga serta pemerintah setempat guna mendukung peningkatan

kesiapsiagaan dan langkah-langkah preventif dalam menghadapi banjir.

1.5.2. Manfaat Akademis

- a) Menambah wawasan dalam kajian manajemen bencana, khususnya dalam konteks mitigasi risiko banjir di daerah rawan bencana.
- b) Berperan dalam memperkaya ranah keilmuan terkait bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsinya dalam penanggulangan bencana, terutama melalui upaya penguatan koordinasi, pembuatan kebijakan, serta implementasi berbagai strategi mitigasi.

1.6. Penjelasan Istilah

Beberapa penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.6.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BPBD merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas utama dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengintegrasikan berbagai upaya penanggulangan bencana di wilayah daerah. Lembaga ini mengambil bagian penting dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana, mengelola respons saat bencana berlangsung, serta memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan pascabencana.

1.6.2. Resiko Banjir

Resiko terjadinya banjir di sebuah kawasan erat terkait dengan sejumlah pemicu, antara lain intensitas hujan yang meningkat, melimpahnya air sungai hingga melewati batas normal, serta gangguan pada fasilitas pengendali banjir seperti tanggul yang mengalami kerusakan. Ancaman banjir tidak hanya membawa peluang kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap aspek sosial masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kelestarian lingkungan setempat.

1.6.3. Mitigasi bencana

Dalam konteks penanggulangan bencana, mitigasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang guna meminimalkan kemungkinan terjadinya maupun dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana. Upaya ini meliputi penerapan strategi antisipatif, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan sarana dan prasarana agar risiko dan kerugian yang mungkin muncul dapat ditekan secara signifikan. Tujuan mitigasi adalah untuk meminimalkan kerugian materiil maupun korban jiwa akibat bencana.

1.6.4. Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAS adalah suatu wilayah yang dilewati oleh aliran sungai beserta anak-anak sungainya. DAS memiliki peran penting dalam mengatur distribusi air dan mengontrol banjir, sehingga keberlanjutan pengelolaannya sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir.